

BAGAIMANA MENGURUS IZIN PERUSAHAAN JASA KEUANGAN

Muhammad Adil ‘Azmi

222040100013

Semester 4 / A2

Program Studi Hukum

Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pendahuluan

“Buku Ajar Hukum Perusahaan” dari Umsida memiliki keunggulan dalam menyajikan konten yang mendalam mengenai hukum perusahaan, serta memberikan informasi yang terperinci dan komprehensif. Selain itu sebagai karya dari penerbit terkemuka, buku ini menawarkan keandalan informasi yang tinggi dan standart kualitas yang. Penyajian data dan informasinya yang terstruktur dengan baik dalam buku ini memudahkan untuk memahami materi yang disajikan.(Multazam et al., 2023)

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Republik Indonesia No. 1/POJK.07/2013 memberikan pedoman yang jelas tentang penerapan Prinsip Good Corporate Governance bagi perusahaan Jasa Keuangan di Indonesia, mendorong tata Kelola Puerusahaan yang baik dan menegakkan hukum serta pengawasan yang ketat.(*POJK 1 - 2013.Pdf*, n.d.)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ototitas Jasa Keuangan menyediakan landasan hukum yang komprehensif mengenai fungsi dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur perlindungan kinsmen dan stabilitas sistem keuangan, serta memberikan arah kebijakan yang jelas untuk sektor keuangan di Indonesia.(*UU 21 Tahun 2011.Pdf*, n.d.)

Tahapan Pertama : Mempersiapkan Dokumen dan Persyaratan.

Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam proses perizinan jasa keuangan adalah menyiapkan dokumen dan persyaratan yang diperlukan seperti, dokumen-dokumen pendirian usaha, daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan, struktur perusahaan, dan informasi terkait pemegang saham perusahaan. Secara keseluruhan, dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen perushaaan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan perusahaan.

Langkah persiapan dokumen ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai department di perusahaan yang baik / legal seperti, keuangan, dan manajemen atas. Proses ini juga melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap setiap dokumen untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan yang dapat menghambat proses pengajuan izin. Sehingga, kesiapan dan ketelitian dalam menyusun dokumen-dokumen ini sangat penting dan menentukan kelancara dalam suatu proses perizinan.

Tahapan Dua : Pengajuan Permohonan Izin

Langkah selanjutnya yaitu mengajukan izin kepada lembaga pengawas keuangan yang berwenang. Proses pengajuan ini merupakan tahapan penting dalam mengurus izin perusahaan jasa keuangan. Penjabaran lebih lanjut yaitu

1. Penyusunan Berkas Permohonan Izin

Pada tahap ini, perusahaan harus menyusun berkas permohonan izin secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkas ini biasanya mencakup dokumen-dokumen penting yang telah dipersiapkan pada tahap persiapan, seperti akta pendirian perusahaan, daftar kegiatan usaha, struktur perusahaan, laporan keuangan, serta informasi tentang pemegang saham dan pengurus perusahaan.

2. Penyerahan Berkas Permohonan ke Otoritas yang Berwenang

Setelah berkas permohonan izin telah disusun dengan baik, langkah selanjutnya adalah menyerahkan berkas tersebut kepada otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Penyerahan berkas ini dapat dilakukan secara daring atau langsung ke kantor otoritas terkait.

3. Evaluasi Awal Permohonan Izin

Setelah berkas permohonan diserahkan, otoritas yang berwenang akan melakukan evaluasi awal terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diajukan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa berkas yang diserahkan memenuhi standar yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha.

4. Komunikasi dengan Otoritas

Pada tahap ini, perusahaan perlu menjaga komunikasi yang baik dengan otoritas yang menangani permohonan izin. Jika terdapat pertanyaan atau permintaan tambahan dari pihak otoritas, segera tanggapi dengan jelas dan tepat. Komunikasi yang lancar dan transparan akan membantu mempercepat proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait permohonan izin.

5. Pengawasan dan Tindak Lanjut

Setelah permohonan izin diajukan, perusahaan perlu melakukan pengawasan terhadap proses pengajuan tersebut. Pastikan untuk memonitor perkembangan permohonan izin secara berkala dan siap untuk memberikan informasi tambahan atau melakukan tindak lanjut jika diperlukan. Kesiapan untuk merespons dengan cepat akan membantu memperlancar proses pengajuan izin dan mendapatkan keputusan yang diharapkan.

Tahapan tiga : Evaluasi dan Verifikasi

Setelah permohonan izin diajukan dan berkas permohonan di serahkan, otoritas yang berwenang akan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kelayakan perusahaan.

1. Pemeriksaan Dokumen dan Kelengkapan Berkas

Otoritas yang berwenang akan melakukan pemeriksaan dokumen yang telah diserahkan pada tahap pengajuan izin. Mereka akan mengevaluasi apakah semua dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Penting bagi perusahaan untuk memastikan kelengkapan dari setiap dokumen yang diserahkan agar tidak terjadi kendala yang menghambat proses perizinan.

2. Penilaian Kelayakan Perusahaan

Setelah pemeriksaan dokumen dilakukan, otoritas akan melakukan penilaian terhadap kelayakan perusahaan untuk mendapatkan izin usaha. Evaluasi ini meliputi berbagai aspek, seperti kepatuhan terhadap regulasi, struktur perusahaan, keuangan perusahaan, serta kemampuan perusahaan untuk menjalankan usaha jasa keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Wawancara dan Inspeksi Lapangan

Dalam beberapa kasus, otoritas yang berwenang dapat melakukan wawancara langsung atau inspeksi lapangan untuk memverifikasi informasi yang diberikan dalam berkas permohonan. Wawancara dapat dilakukan dengan manajemen perusahaan atau pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut mengenai aktivitas perusahaan. Sementara inspeksi lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4. Penentuan Keputusan Izin

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan, otoritas akan menentukan keputusan terkait pemberian izin usaha kepada perusahaan jasa keuangan. Keputusan ini dapat berupa persetujuan penuh, persetujuan dengan syarat tertentu, atau penolakan izin. Perusahaan perlu siap untuk menerima berbagai kemungkinan keputusan ini dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.

5. Komunikasi Hasil Evaluasi

Setelah keputusan izin dikeluarkan, otoritas akan mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada perusahaan. Jika izin disetujui, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memahami syarat-syarat yang ditetapkan dan siap untuk mematuhi ketentuan tersebut. Namun, jika terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi, perusahaan perlu segera mengambil tindakan korektif atau perbaikan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Melalui tahapan evaluasi dan verifikasi ini, perusahaan jasa keuangan dapat memperoleh kejelasan mengenai status izin usaha mereka dan memulai operasional mereka dengan mematuhi regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Mengurus izin perusahaan jasa keuangan membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan Kerjasama yang baik dengan perusahaan atau otoritas yang berwenang. Dengan memahami tahapan-tahapan yang diperlukan serta mempersiapkan semua dokumennya dengan baik, proses ini dapat diselesaikan dengan sukses. Penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku dengan

menjaga kualitas layanan keuangan yang diberikan agar perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan, supaya dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian dan keuangan masyarakat.

REFRENSI

Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. (2023). *Buku Ajar Hukum*

Perusahaan. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>

POJK 1—2013.pdf. (n.d.).

UU 21 Tahun 2011.pdf. (n.d.).